



## **ANALISIS POTENSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUMDES DI WILAYAH KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG**

**Endang Irawan Supriyadi**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,

Universitas Subang, Indonesia

E-mail: [endangirawan.ei@gmail.com](mailto:endangirawan.ei@gmail.com)

### ***Abstract***

*BUMDes is a business entity legalized by the government with the main objective of building a business in accordance with the potential of the village for the greatest possible welfare of the village community, although there are still obstacles encountered empirically. Therefore this study will analyze the potential and obstacles encountered in establishing BUMDes in the Sagalaherang District, Subang Regency. This research method uses a Qualitative Research Method with a Case Study approach. The results of this study using SWOT analysis show that BUMDes in the Sagalaherang District, Subang Regency have potential that can be utilized, where Sagalaherang District is included in the Tourism area and even several villages have received a Regent's Decree as a Tourism Village but have limitations regarding human resources managing BUMDes besides that the community and administrators still don't understand the purpose of establishing BUMDes. Therefore it is necessary to socialize BUMDes to the community and implement the development of BUMDes management human resources.*

**Keywords:** *BUMDes, Village, SWOT Analysis*

### ***Abstrak***

BUMDes merupakan badan usaha yang dilegalisasi oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah membangun usaha sesuai dengan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa walaupun empirisnya masih terdapat kendala yang dihadapi. Oleh karena itu Penelitian ini akan menganalisis potensi dan kendala yang dihadapi dalam mendirikan BUMDes di wilayah Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa BUMDes di wilayah Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan, dimana Kecamatan Sagalaherang termasuk kedalam wilayah Wisata bahkan beberapa Desa sudah mendapat SK Bupati sebagai Desa Wisata namun memiliki keterbatasan mengenai sumber daya manusia pengelola BUMDes selain itu masih belum memahaminya masyarakat dan penelora mengenai tujuan didirikannya BUMDes. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai BUMDes terhadap masyarakat dan dilaksanakannya pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes.

**Kata Kunci :** *BUMDes, Desa, Analisis SWOT*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan angin segar dan penegasan bahwa desa merupakan pemerintahan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi segala hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat setempat, sebagai perpanjangan tangan dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (Supriyadi & Asih, 2019). Meliputi pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya tentang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Amantha, 2021) BUMDes dimaksudkan untuk menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang dapat difungsikan sebagai lembaga sosial dan komersial (Igul & Cikusin, 2021). BUMDes merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Desa dalam mengoptimalkan potensi desa dalam kegiatan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil jika implementasi yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asih et al., 2022). BUMDes didirikan untuk mendukung misi dari pemerintah yaitu membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa (Rahmawati, 2020)

Pembentukan BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat dan lengkap. Landasan Hukum yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri Pengelolaan BUMDes bahkan jika diperlukan dapat dibentuk Peraturan Daerah/ Bupati/ Walikota dan Peraturan Desa (Ridlwan, 2015). BUMDes berbasis usaha atau bisnis yang dikelola oleh masyarakat dan perangkat desa setempat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa (Fitriyanti, 2019). Perlu adanya sosialisasi agar masyarakat desa paham mengenai BUMDes, tujuan dari pendirian BUMDes, adanya manfaat pendirian BUMDes (Henggar Jati & Retno, 2022). Namun BUMDes yang diharapkan dapat memberikan peningkatan ekonomi di desa belum dapat diwujudkan karena secara umum, fenomena yang terjadi dalam tatakelola Badan Usaha Milik Desa yakni Aparatur Pemerintahan Desa masih belum banyak memahami proses tatakelola Badan Usaha Milik Desa, sumber dana yang masih kurang, belum memahami bagaimana mekanisme

mendapatkan sumber permodalan dan pembiayaan, belum adanya jalinan Kerjasama, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa (Juliman & muslimin, 2019).

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten Di Jawa Barat yang berjarak  $\pm 70$  km dari ibu kota propinsi. Kabupaten Subang telah mendukung pemerintah pusat secara penuh berkenaan dengan pendirian BUMDes melalui Peraturan Bupati Subang No. 3 Tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes pada pasal 4 ayat 1 yang mengatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Kecamatan Sagalaherang merupakan daerah administratif yang berada di Kabupaten Subang termasuk kedalam wilayah wisata karena berdampingan dengan ciater dan lembang. Kecamatan Sagalaherang memiliki 7 (tujuh) desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan, dari 7 (tujuh) Desa, terdapat 3 (tiga) Desa yang BUMDes nya masih memiliki kendala dengan pengelola yang terus berganti. sementara 4 Desa yang BUMDes nya masih dikelola dan memiliki kontribusi terhadap PADes sebagian besar bergerak dibidang jasa seperti jasa sewa panggung, jasa pembayaran listrik, jasa mobil siaga, jasa angkut sampah sementara jika merujuk ke Permendes PDTT No. 4 tahun 2015 bahwa penentuan jenis usaha adalah harus mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Jumlah unit usahanya sendiri tidak ada pembatasan, asalkan mampu dikelola dengan baik. Dari jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes dengan potensi wilayah tentu belum sinkron karena wilayah Sagalaherang termasuk kedalam wilayah pegunungan dan termasuk kedalam daerah wisata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan masalah yang dihadapi dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2011). Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti (Nina Adlini et al., 2022) dengan pendekatan studi kasus. Menurut Baxter dan Jack dalam (Nurahma & Hendriani, 2021), Studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang memfasilitasi peneliti untuk menyelidiki sebuah fenomena menggunakan sumber data yang beragam. Fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan

kasus, artinya hal yang actual (*real-life events*), sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat (Rijal Fadli, 2021).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Data primer diambil dari *depth interview* melalui informan terkait objek penelitian dan observasi (Fitriyanti, 2019). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau informan (Sugiyono, 2012). Informan yang diwawancarai oleh peneliti berasal dari Kantor Kecamatan Sagalaherang, Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sagalaherang, Pengelola BUMDes di setiap Desa di Kecamatan Sagalaherang. Data sekunder didapatkan dari laporan yang dibuat oleh Desa dan Kecamatan, serta studi literatur. Selanjutnya Data dianalisis menggunakan metode SWOT, yaitu dengan melihat faktor internal yang meliputi *stregths* dan *weaknesses*, serta faktor eksternal yang meliputi *opportunities*, dan *threats*. Menurut Marshall, & Rossman, 1999 dalam (Rijal Fadli, 2021) pada triangulasi data yang diperoleh dari tiga metode yaitu *interview*, *participant observation*, dan analisis dokumen (*document record*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Subang sudah memberikan dukungan secara penuh kepada Desa untuk mendirikan BUMdes dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Subang No. 3 Tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan memberikan tugas kepada Kecamatan untuk membina pemerintahan Desa termasuk Pendirian BUMDes. Sementara untuk Desa sendiri, telah melaksanakan instruksi dengan mendirikan BUMDes melalui Peraturan Desa (Perdes). Namun pelaksanaannya memiliki kendala terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa yang dapat mengelola BUMDes sehingga berdaya guna dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan Desa.

### **A. Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis (Mashuri & Nurjannah, 2020).

#### **Faktor Internal**

##### **1. *Strengths*/ Kekuatan (S)**

*Strengths* merupakan situasi atau keadaan yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini berasal dari dalam. Adapun faktor yang dapat menjadi kekuatan BUMDes di wilayah kecamatan Sagalaherang adalah (1) Secara geografis wilayah

Kecamatan Sagalaherang termasuk kedalam daerah pegunungan sehingga menjadi daerah tujuan wisata tentunya akan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung (2) Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan kecamatan melalui Peraturan Bupati Subang dan pembinaan yang langsung dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan (3) memiliki anggaran untuk modal usaha bersumber dari Dana Desa melalui APBDes yang dapat dikelola oleh pengelola BUMDes secara mandiri.

## **2. Weakness/ Kelemahan (W)**

*Weakness* merupakan kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Adapun faktor yang dapat menjadi kelemahan BUMDes di wilayah kecamatan Sagalaherang adalah (1) kurangnya sosialisasi tentang BUMDes terhadap masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes sangat minim (2) kurangnya SDM yang mumpuni dalam mengelola BUMDes (3) Pengelola BUMDes memiliki kegiatan lain sehingga waktu yang digunakan untuk BUMDes hanya sedikit

## **Analisis SWOT Faktor Eksternal**

### **1. Opportunities/ Peluang (O)**

*Opportunities* merupakan segala sesuatu atau kondisi berasal dari eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi. Adapun faktor yang dapat menjadi peluang bagi BUMDes di wilayah kecamatan Sagalaherang adalah (1) secara umum Pemerintah sudah membuat kebijakan berkaitan dengan pembentukan BUMDes (2) Kecamatan Sagalaherang secara geografis berdekatan dengan Ciater dan Lembang sehingga keberadaan destinasi wisata ciater dan lembang memberikan dampak yang baik bagi BUMDes jika dapat mengambil peran baik dalam menciptakan desa wisata atau membuat produk yang dapat dipasarkan di tempat wisata tersebut. (3) Kecamatan Sagalaherang berada di wilayah kerja PT perkebunan yang memiliki lahan yang luas sehingga dapat menciptakan kerjasama dalam mengelola perkebunan maupun memanfaatkan dana CSR untuk membangun BUMDes.

### **2. Threat/ Ancaman (T)**

*Threat* merupakan segala sesuatu atau faktor yang tidak memberikan manfaat dan jika diabaikan akan memberikan dampak tidak baik. Adapun faktor yang dapat menjadi ancaman bagi BUMDes di wilayah kecamatan Sagalaherang adalah (1) Keberadaan lembaga lain seperti Lumbung Ekonomi Desa yang sudah berdiri sebelumnya menjadikan BUMDes sulit untuk dikelola karena dianggap mengganggu lembaga sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (2) Destinasi wisata yang berada dilingkungan dekat kecamatan Sagalaherang sudah menjadi daerah tujuan wisata sehingga

sulit bagi BUMDes untuk membangun wisata atau kerjsama dengan pihak ke-3 karena lebih memilih tempat wisata yang sudah berdiri dan maju (3) keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun BUMDes karena lebih memilih bekerja untuk kepentingan pribadi atau membanguna bisnis pribadi

**Tabel 1 : Matrik SWOT Pendirian BUMDes Di Wilayah Kecamatan Sagalaherang**

<b>Faktor Internal</b>	
<b><i>Strenght/ Kekuatan (S)</i></b>	<b><i>Weakness/ Kelemahan (S)</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara geografis wilayah Kecamatan Sagalaherang termasuk kedalam daerah pegunungan sehingga menjadi daerah tujuan wisata tentunya akan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung</li> <li>• Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan kecamatan melalui Peraturan Bupati Subang dan pembinaan yang langsung dilakukan oleh Pemeritah Kecamatan</li> <li>• Memiliki anggaran untuk modal usaha bersumber dari Dana Desa melalui APBDes yang dpat dikelola oleh pengelola BUMDes secara mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan lembaga lain seperti Lumbung Ekonnomi Desa yang sudah berdiri sebelumnya menjadikan BUMDes sulit untuk dikelola karena dianggap mengganggu lembaga sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat</li> <li>• Destinasi wisata yang berada dilingkungan dekat kecamatan Sagalaherang sudah menjadi daerah tujuan wisata sehingga sulit bagi BUMDes untuk membangun wisata atau kerjsama dengan pihak ke-3 karena lebih memilih tempat wisata yang sudah berdiri dan maju</li> <li>• keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun BUMDes karena lebih memilih bekerja untuk kepentingan pribadi atau membanguna bisnis pribadi</li> </ul>
<b>Faktor Eksternal</b>	
<b><i>Opportunities/ Peluang (O)</i></b>	<b><i>Threath/ Kelemahan (T)</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum Pemerintah sudah membuat kebijakan berkaitan dengan pembentukan BUMDes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan lembaga lain seperti Lumbung Ekonnomi Desa yang sudah berdiri sebelumnya menjadikan BUMDes</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Sagalaherang secara geografis berdekatan dengan Ciater dan Lembang sehingga keberadaan destinasi wisata ciater dan lembang memberikan dampak yang baik bagi BUMDes jika dapat mengambil peran baik dalam menciptakan desa wisata atau membuat produk yang dapat dipasarkan di tempat wisata tersebut.</li><li>• Kecamatan Sagalaherang berada di wilayah kerja PT perkebunan yang memiliki lahan yang luas sehingga dapat menciptakan kerjasama dalam mengelola perkebunan maupun memanfaatkan dana CSR untuk membangun BUMDes.</li></ul>	<p>sulit untuk dikelola karena dianggap mengganggu lembaga sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Destinasi wisata yang berada dilingkungan dekat kecamatan Sagalaherang sudah menjadi daerah tujuan wisata sehingga sulit bagi BUMDes untuk membangun wisata atau kerjasama dengan pihak ke-3 karena lebih memilih tempat wisata yang sudah berdiri dan maju</li><li>• keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun BUMDes karena lebih memilih bekerja untuk kepentingan pribadi atau membanguna bisnis pribadi</li></ul>
---	--

*Sumber : Data Primer yang diolah (2023).*

### **Kesimpulan**

Pendirian BUMDes di seluruh Desa Wilayah Kecamatan Sagalaherang sejatinya sudah dilaksanakan dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Subang melalui pembinaan Kecamatan Sagalaherang kepada Desa sehingga Desa menerbitkan Peraturan Desa sebagai dasar pendirian BUMDes. Potensi yang dimiliki oleh Desa di Wilayah Kecamatan Sagalaherang sangat baik karena masuk kedalam daerah Wisata bahkan Pemerintah Kabupaten Subang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Desa wisata, salah satunya adalah Desa di Wilayah Kecamatan Sagalaherang. Namun terdapat kelemahan yang menjadi masalah dihadapi oleh BUMDes. Mayoritas para pengelola yang ditunjuk dan dipilih oleh Pemerintah Desa tidak seluruhnya dapat dengan maksimal mengelola BUMDes. Hal ini karena Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa perlu untuk ditingkatkan dan yang paling mendasar adalah kurangnya pemahaman, baik masyarakat maupun pengelola BUMDes itu sendiri mengenai tujuan utama pendirian BUMDes yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Dengan demikian perlu adanya peningkatan sumber daya manusia pengelola BUMDes dengan melakukan pendampingan secara penuh oleh pemerintah dengan memperhatikan hasil analisis SWOT yang telah diuraikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Asih, D. B., Supriyadi, E. I., & Sofyan, M. M. (2022). Kebijakan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di. *Jurnal Identitas*, 2(1), 22–32. <https://doi.org/10.52496/identitas.v2i1.217>
- Fitriyanti, S. (2019). Analisis Potensi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Hiyung Kabupaten Tapin Potential Analysis Of Establishment Of Bumdes Based On Local Wisdom In Tapin Regency. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 55–62. <https://jkpjournals.com/index.php/menu/article/view/0000-0003-0715-4777>
- Henggar Jati, A., & Retno, N. H. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) De Bale Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. *Jati / Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 1–34. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33583>
- Igul, & Cikusin, Y. (2021). Impelementasi Permendes Pdt No 4 Tahun 2015 Di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima Implementation Of The Pdt Ministerial Regulation No. 4 Of 2015 In Naru Village, Sape District, Bima Regency. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(2), 140–153. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/163>
- Juliman, & muslimin, amra. (2019). Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1).
- Mashuri, & Nurjannah, D. (2020). Analisis Swot Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). In *Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (29th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>



- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). *Jurnal Rasi Universitas Muhammadiyah Bandung*, 1(2).

